



Perspektif Pertukaran Sosial dalam Perilaku Politik Masyarakat pada Pilkada Kota Malang 2013

Wimmy Haliim¹✉

¹ Universitas Brawijaya, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima 28 Februari 2017
Disetujui 27 Maret 2017
Dipublikasi 15 Juli 2017

Keywords:
Political Behavior, Social Exchange and Rational Choice

Abstrak

Penelitian ini mencoba untuk mengangkat ke permukaan terkait dengan munculnya fenomena menarik pada perilaku politik masyarakat di Malang. Ternyata di dalam hasil penelitian ini, peneliti menemukan empat faktor yang memiliki pengaruh pada perilaku politik masyarakat kota Malang. Di antaranya adalah, Pertukaran nilai dalam keluarga dan pengaruhnya pada psikologis perilaku politik memilih, Kedekatan dengan masyarakat dan pertukaran kepercayaan antara calon dan pemilih, Pertukaran ekonomi dan pengaruhnya terhadap perilaku politik memilih, dan Tukar-menukar harapan perubahan dari calon kepada masyarakat. Jadi, ada beberapa orang yang memilih kandidat calon karena pengaruh dari lingkungan keluarga. Beberapa orang lain juga memilih calon berdasarkan figurinya. Selain kedua bentuk perilaku yang telah disebutkan sebelumnya, masyarakat miskin perkotaan akan memilih calon karena kedekatan calon dengan masyarakat dan alasan rasional lainnya, seperti politik uang. Hal ini tentu saja wajar terjadi, karena teori pertukaran sosial menyebutkan bahwa interaksi sosial dalam berbagai struktur masyarakat akan terjadi jika adanya kegiatan saling tukar menukar, dalam bentuk materi atau non-materi.

Abstract

This research tries to generate the surface related to the emergence of an interesting phenomenon on the people political behavior in Malang. It turns out that the results of the study, the researcher found four factors influenced the political behavior. They are exchange values of the family and psychological effect on political behavior, close relation towards the community and exchange of trust between candidates and voters, exchange of economy and its influence on political behavior and exchange of expectations changes from candidate to the people. This research shows that there are some factors which influence voters to vote the candidate. First, they who vote based on the family relation, on their figures. Then, apart from the two forms of behavior that have been mentioned earlier, because of the proximity of the candidate with the community and other rational reasons, such as money politics. These phenomena happened in every political behavior of community. As stated in social exchange theory, that is mentioned social interactions in various structures of society will occur if there is a mutual exchange, in the form of material or non-material.

Pendahuluan

Pesta demokrasi seperti pemilihan umum daerah di Kota Malang dapat menjadi acuan bagaimana perilaku politik masyarakat kota Malang dalam memilih seorang kandidat politik yang mereka percaya. Terutama pada pemilukada yang dilakukan pada tahun 2013. Muncul fenomena dimana kandidat yang memiliki perbedaan etnis dengan masyarakat pribumi kota Malang pada umumnya dapat memenangkan pilkada kota Malang, yaitu H.M Anton¹ dengan kemenangan mutlak sebesar 48,15%. Padahal dua periode sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan *'jagoan'* nya, Peni Suparto dalam memenangkan pilkada kota Malang sebanyak dua periode. Kemenangan H.M Anton itulah yang merupakan sejarah baru bagi Kota Malang.² Tentunya dari fenomena tersebut muncul dua pertanyaan kenapa fenomena tersebut bisa terjadi. Yang pertama adalah memang karena independensi pemilih, atau yang kedua karena ada faktor eksternal yang mempengaruhi masyarakat untuk mengarahkan pilihannya kepada pilihan-pilihan tertentu.

Independensi pemilih ini ada dikarenakan faktor demografi masyarakat perkotaan. Kota adalah suatu tempat yang memiliki banyak perbedaan dari desa. Terkait pembangunan, kota memiliki fasilitas publik

yang lebih lengkap, dan luas geografinya pun tidak seluas pedesaan. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat kota secara naluriah bisa mempunyai akses yang lebih gampang dan dekat dengan fasilitas-fasilitas publik seperti pendidikan. Sehingga masyarakat kota adalah masyarakat yang memiliki pengetahuan yang cukup luas untuk digunakan memilih kandidat politik yang sesuai dengan independensi mereka mereka.

Lebih lanjut William G. Flanagan (2010) menjelaskan bahwa perilaku politik adalah proses-proses atau kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik adapun yang dimaksud dengan perilaku politik. Khusus bagi masyarakat perkotaan, mereka masih dipengaruhi oleh dimensi-dimensi pembangunan fisik maupun ekonomi kota tersebut. Hal ini berkaitan dengan *magnet* yang dimiliki oleh kota yaitu adalah tawaran perputaran dan pergerakan ekonomi yang besar. Fenomena ini terjadi karena masyarakat perkotaan mempunyai cirri untuk melakukan pendekatan *rational choice* dalam setiap kegiatan ekonomi maupun politiknya.

Lalu yang dimaksud faktor eksternal yang dapat mempengaruhi dan mengarahkan pilihannya kepada pilihan tertentu adalah pengaruh dari elit. Secara etimologi istilah *elite* berasal dari kata latin *eligere* yang berarti memilih. Pada abad ke 14 istilah ini

¹ Mochammad Anton – Sutiaji adalah pasangan calon yang memenangkan pemilu daerah Kota Malang dengan satu putaran. Mereka didukung Total 7 Kursi parlemen, masing-masing 5 Kursi dari PKB dan 2 Kursi dari Gerindra.

² PDIP mengusung Sri Rahayu-Priyatmoko Oetomo. Golkar justru mengusung istri Peni Suparto, mantan ketua DPC PDIP Kota Malang, Heri Pudji Utami-Sofyan Edy Jarwoko.

berkembang menjadi *a choice of persons* yang artinya orang terpilih (Mosca, 1939). Dalam setiap masyarakat terdapat dua kelas penduduk yaitu satu kelas yang menguasai yang disebut elit dan satu yang dikuasai yaitu masyarakat. Kelas pertama atau elit yang jumlahnya selalu minoritas, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu. Sedangkan kelas kedua, yang jumlahnya jauh lebih besar, diatur dan dikendalikan oleh kelas elit itu.

Dari banyak penjelasan diatas, penulis menentukan bahwa teori pertukaran sosial bisa menjadi teori yang menarik guna dijadikan pisau analisis untuk menjelaskan permasalahan diatas. Karena pada dasarnya, teori pertukaran sosial adalah teori yang berkaitan dengan tindakan sosial yang memberi atau menukar objek-objek yang mengandung nilai antar-individu berdasarkan tatanan sosial tertentu (Wirawan, 2012). Adapun objek yang dipertukarkan itu bukanlah benda yang nyata, melainkan hal-hal yang tidak nyata. Ide tentang pertukaran itu juga yang menyangkut perasaan sakit, beban hidup, harapan, pencapaian sesuatu, dan pernyataan-pernyataan antar individu. Dengan demikian, ide tentang pertukaran itu sangat luas tetapi inklusif. Dengan demikian, ide tentang pertukaran itu sangat luas tetapi inklusif.

Selain itu, Manusia adalah makhluk rasional. Asumsi ini didasarkan pada pemikiran bahwa di dalam batasan-batasan

informasi yang tersedia untuknya, manusia akan menghitung pengorbanan dan penghargaan dari sebuah situasi tertentu dan ini akan menuntun perilakunya. Hal ini juga mencakup kemungkinan bila dihadapkan pada pilihan yang tidak memberikan penghargaan, orang akan memilih pilihan yang paling sedikit membutuhkan pengorbanan. Dengan berasumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional, Teori Pertukaran Sosial menyatakan bahwa manusia menggunakan pemikiran rasional untuk membuat pilihan.

Pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor dimana aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakan tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan tersebut, aktor pun dipandang mempunyai pilihan atau nilai serta keperluan. Pilihan rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor, yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihan aktor. Pilihan rasional tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan (Warsono, 2010). Lalu, pilihan rasional yang berasal dari ilmu ekonomi adalah tindakan dimana para pelaku memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka.

Teori pertukaran adalah teori yang berkaitan dengan tindakan sosial yang memberi atau menukar objek-objek yang mengandung nilai antar-individu berdasarkan tatanan sosial tertentu. Adapun objek yang dipertukarkan itu bukanlah benda yang nyata, melainkan hal-hal yang tidak nyata. Ide tentang pertukaran itu juga yang menyangkut perasaan sakit, beban hidup, harapan, pencapaian sesuatu, dan pernyataan-pernyataan antar individu. Dengan demikian, ide tentang pertukaran itu sangat luas tetapi inklusif. Dengan demikian, ide tentang pertukaran itu sangat luas tetapi inklusif.

Jika dikaitkan dengan perilaku politik masyarakat, *behaviorsme* memegang peranan penting dalam menjelaskan hubungan perilaku manusia sebagai bagian dari masyarakat dengan kondisi politik yang ada didaerahnya pula. Perilaku politik masyarakat terbentuk dengan berbagai cara, tetapi pengaruh besar tetap berasal dari lingkungannya. Hal ini di sebabkan konstruk perilaku dasar dari manusia masih mementingkan untung-rugi yang berimbang kedirinya. Untung-rugi yang dimaksud bukan hanya masalah materi semata, tetapi bagaimana harapan, ide, ataupun pencapaian mereka bisa tercapai atau tidak.

Teori pertukaran sosial mempunyai prinsip bahwa manusia adalah makhluk rasional. Asumsi ini didasarkan pada pemikiran bahwa di dalam batasan-batasan informasi yang tersedia untuknya, manusia akan menghitung pengorbanan dan

penghargaan dari sebuah situasi tertentu dan ini akan menuntun perilakunya. Hal ini juga mencakup kemungkinan bila dihadapkan pada pilihan yang tidak memberikan penghargaan, orang akan memilih pilihan yang paling sedikit membutuhkan pengorbanan. Dengan berasumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional, Teori Pertukaran Sosial menyatakan bahwa manusia menggunakan pemikiran rasional untuk membuat pilihan.

Asumsi berikutnya adalah bahwa standar yang digunakan manusia untuk mengevaluasi pengorbanan dan penghargaan bervariasi seiring berjalannya waktu dan dari satu orang ke orang lainnya menunjukkan bahwa teori ini harus mempertimbangkan adanya keanekaragaman. Tidak ada satu standar yang dapat diterapkan pada semua orang untuk menentukan apa pengorbanan dan penghargaan itu. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku politik masyarakat kota Malang pada pilkada kota Malang 2013. Selain itu untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat perkotaan, khususnya masyarakat kota Malang. Selain itu penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran dalam bentuk tulisan untuk memperkaya corak keilmuan ilmu politik

Kajian Pustaka

Metodologi Penelitian

Studi kasus (*case study*) merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian dalam

ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya (Yin, 2013)

Fokus studi kasus adalah spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya ataupun suatu potret kehidupan (Creswell, 2012). Lebih lanjut Creswell (2012) mengemukakan beberapa karakteristik dari suatu studi kasus yaitu : mengidentifikasi “kasus” untuk suatu studi; Kasus tersebut merupakan sebuah “sistem yang terikat” oleh waktu dan tempat; Studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan datanya untuk memberikan gambaran secara terinci dan mendalam tentang respons dari suatu peristiwa dan; Menggunakan pendekatan studi kasus, penulis akan “menghabiskan waktu” dalam menggambarkan konteks atau setting untuk suatu kasus. Hal ini mengisyaratkan bahwa suatu kasus dapat dikaji menjadi sebuah objek studi (Mulyadi, 2011).

Berdasarkan paparan di atas, dapat diungkapkan bahwa studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/beragam kasus” yang dari

waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu. Dengan perkataan lain, studi kasus merupakan penelitian dimana penulis menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.

Pengumpulan data dalam studi kasus dapat diambil dari berbagai sumber informasi, karena studi kasus melibatkan pengumpulan data yang “kaya” untuk membangun gambaran yang mendalam dari suatu kasus. Yin (2013) mengungkapkan bahwa terdapat enam bentuk pengumpulan data dalam studi kasus yaitu: (a) dokumentasi yang terdiri dari surat, memorandum, agenda, laporan-laporan suatu peristiwa, proposal, hasil penelitian, hasil evaluasi, kliping, artikel; (b) rekaman arsip yang terdiri dari rekaman layanan, peta, data survei, daftar nama, rekaman-rekaman pribadi seperti buku harian, kalender dsb; (c) wawancara biasanya bertipe *open-ended*; (d) observasi langsung; (e) observasi partisipan dan (f) perangkat fisik atau kultural yaitu peralatan teknologi, alat atau instrumen, pekerjaan seni dll.

Sedangkan untuk metode pemilihan informan, penulis menggunakan metode purposive sampling. Kriyantono (2006) mendefinisikan *purposive sampling* sebagai teknik yang mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat penulis berdasarkan tujuan penelitian. Sedangkan orang-orang dalam populasi yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut tidak dijadikan sampel. Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud dan tujuan tertentu atau sampel dianggap memiliki atau mengetahui informasi yang diperlukan bagi penelitian.

Untuk mengumpulkan data dari para informan, penulis dapat menggunakan metode wawancara. Metode wawancara yang digunakan adalah kategori *in depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya menggunakan wawancara semistruktur, karena lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam wawancara, penulis perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan (Sugiyono, 2008)

Dengan teknik wawancara seperti ini, penulis meyakini bahwa dapat mendapatkan informasi yang mendalam terkait data yang ingin didapatkan penulis. Dengan teknik ini, penulis bisa terlihat informal, dengan begitu pihak yang diwawancara tidak tertekan dengan pertanyaan yang diajukan oleh

penulis. Pihak yang diwawancarai pun bisa lebih santai karena nantinya bisa memberi masukan atas permasalahan yang dikemukakan oleh penulis.

Temuan dan Diskusi

Memahami Perilaku Politik Masyarakat Kota Malang Dalam Perspektif Teori Pertukaran Sosial

Dinamika politik Pilkada Kota Malang yang dijelaskan diatas merupakan bagian dari fakta sosial (realitas sosial) yang dapat dijelaskan dengan teori pertukaran sosial memandang perilaku sosial sebagai pertukaran aktivitas dan kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Teori Homans ini berangkat dari asumsi ekonomi dasar (pilihan rasional), yaitu individu memberi apa dan mendapatkan apa, apakah menguntungkan atau tidak.

Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Malang tahun 2013 lalu adalah sebuah gambaran individu sebagai masyarakat melakukan aktivitas politik, yaitu saling melakukan pertukaran kepentingan politik. Mengingat yang terlibat dalam proses politik tidak sebatas individu namun juga melibatkan kelompok sosial yang lebih besar, dan pada kasus ini kelompok tersebut memberikan pengaruh besar dalam mengarahkan keputusan politik individu. Oleh karena itu, untuk tulisan ini perlu menggunakan teori pertukaran sosial. Tujuan dari teori pertukaran sosial adalah memahami struktur sosial berdasarkan analisis proses -

proses sosial yang mengatur hubungan antar individu dengan kelompok di dalam kegiatan politik.

Sebagaimana yang dijelaskan pada awal tulisan ini, teori pertukaran sosial menjelaskan secara tentang perilaku politik dalam proses pemilihan kepala daerah. Perilaku politik adalah perilaku yang terjadi didalam lingkungan sosial seutuhnya, termasuk struktur sosial. Teori pertukaran sosial membantu kita untuk melihat dan menganalisi perilaku politik individu dalam kelompok sosial.

Perdebatan mengenai perilaku memilih seseorang dalam Pemilu masih menjadi perdebatan yang tidak kunjung usai. Ini karena banyaknya faktor yang turut mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam memilih. Namun, sedikit sekali penjelasan akademisi sehingga pembahasan mengenai perilaku memilih menjadi tidak lengkap. Dalam konteks yang lebih khusus, justru tidak banyak akademisi yang mengupas proses pembentukan perilaku politik ini yang sebenarnya dipengaruhi oleh banyak variabel. Hal ini disebabkan kompleksnya hubungan variabel dalam memahami perilaku memilih tersebut. Misalnya, dalam banyak kasus proses pembentukan perilaku individu ini terkait dengan nilai-nilai politik yang diyakini oleh individu melalui proses sosialisasi.

Dari kutipan wawancara dengan salah satu informan kunci, Achmad Fauzan³,

³ Beliau dipilih karena memiliki kapasitas sebagai Tokoh Masyarakat dan Mantan Legislatif tahun 1999-2004 & 2004-2009, dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

menurutnya bahwa pemimpin yang mereka pilih, harus tidak melakukan korupsi, karena jika korupsi, masyarakat sendiri yang akan dirugikan. Tapi sekali lagi yang terpenting, sebaik apapun orangnya, tapi jika masyarakat tidak kenal dan para calon tidak dekat dengan masyarakat, sulit sekali mereka akan terpilih. Fakta tersebut merupakan argumentasi pembuka yang menunjukkan bahwa perilaku politik memilih masyarakat kota Malang memiliki kompleksitas yang tinggi. Dapat ditunjukkan bahwa harapan perbaikan menurut mereka harus juga diimbangi sosialiasasi yang mumpuni dari para kandidat. Karena jika hal-hal tersebut tidak dilakukan, yang terjadi adalah para pemilih tidak akan memilih kandidat tersebut, walaupun visimisinya sangat bagus dan mumpuni.

Nilai-nilai politik yang muncul karena seseorang mengalami suatu peristiwa politik yang luar biasa sehingga berdampak pada perubahan preferensi politik mereka. Dalam realitanya, belum banyak akademisi menghubungkan kedua kejadian ini ke dalam satu penjelasan yang komprehensif. Analisis dengan menghubungkan fenomena-fenomena perilaku memilih, baik yang terjadi di dalam maupun di luar diri individu, menegaskan pentingnya memahami pendekatan dalam menjelaskan perilaku memilih seseorang. Malah dalam aspek tertentu, penjelasan tersebut dapat digabungkan sehingga memberikan gambaran yang lengkap terkait dengan perilaku memilih individu yang sangat kompleks. Akan tetapi, dengan

menghubungkan variabel-variabel penjelas yang ada dalam pendekatan perilaku memilih tersebut, maka seseorang dapat memahami faktor dominan yang menentukan mengapa individu cenderung melakukan suatu tindakan politik.

Berdasarkan temuan data di lapangan, dan diskusi data dengan teori, dibuat empat macam kategori dalam penyajian data. Tiap-tiap kategori adalah faktor-faktor yang paling dominan dalam memengaruhi perilaku memilih masyarakat perkotaan. Kategori-kategori tersebut adalah: Pertukaran nilai dalam keluarga dan pengaruhnya pada psikologis perilaku politik memilih, Kedekatan dengan masyarakat dan pertukaran kepercayaan antara calon dan pemilih, Pertukaran ekonomi dan pengaruhnya terhadap perilaku politik memilih, dan Tukar-menukar harapan perubahan dari calon kepada masyarakat.

Pertukaran Nilai Dalam Keluarga dan Pengaruhnya Pada Psikologis Perilaku Politik Memilih

Pendekatan yang dikenal dengan pendekatan Psikologi Sosial dalam menjelaskan perilaku memilih individu seperti aspek lingkungan sosial ekonomi, afiliasi etnis, tradisi keluarga, faktor orang tua, pekerjaan seseorang, tempat tinggal, faktor usia, jenis kelamin dan lain sebagainya (Domikus, 1999). Menurut informan pendukung yang bernama Novita Nia

Megawati⁴, beliau memilih calon wali kota karena arahan suaminya. Beliau beralasan tidak terlalu tahu tentang politik dan pekerjaannya hanya ibu rumah tangga. Hal penting yang dapat disimpulkan dari kajian ini bahwa perilaku memilih seseorang merefleksikan keanggotaan kelompok sosial yang dibentuk oleh kekuatan sosio-ekonomi dan demografi (Mustafa, 2011). Asumsi ini berangkat dari eksistensi individu sebagai makhluk sosial yang berada dalam lingkungan sosial yang dinamis. Lingkungan, terutama keluargalah yang sebenarnya mempengaruhi nilai dan keyakinan politik individu yang selanjutnya menjadi bagian penting dalam perkembangan sikap, perilaku dan tindakan politik mereka. Sementara, kondisi sosio-ekonomi individu menjadi dasar untuk memahami perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar mereka.

Masyarakat kota Malang memilih bukan karena visi misi dan program kerja yang menarik, melainkan karena, salah satunya, adanya preferensi dari keluarga dan orang-orang terdekat kepada salah satu calon yang maju dalam pemilu. Tanpa perlu mengetahui visi misi serta program kerja calon Walikota, masyarakat akan memilih calon Walikota yang bersangkutan karena preferensi dari anggota keluarga dan teman-teman dari masyarakat yang bersangkutan. Dalam kasus Abah Anton yang menang di kecamatan Klojen, masyarakat di kecamatan tersebut juga memilih karena kedekatan tim

⁴ Salah satu informan dari Kecamatan Sukun, Kota Malang

pemenangan dengan saudara maupun teman lama yang ada di sana tanpa pernah bertanya seperti apa visi misi dan program kerja dari Abah Anton.

Menurut Informan kunci yang bernama Bambang Taufik DHT⁵, bahwa abah Anton dapat meraup suara di Klojen dengan menggunakan kedekatan para tim suksesnya dengan saudara maupun teman lama yang ada di sana. Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia pada umumnya adalah masyarakat yang kolektif, sehingga preferensi dari orang-orang terdekat sangat memengaruhi pilihan pada salah satu calon. Dari sini peneliti berpendapat bahwa pengaruh pengelompokan sosial dalam studi perilaku memilih ke dalam dua ranah, yaitu ranah sosial ekonomi keluarga pemilih dan ranah sosial ekonomi pemilih.

Analisa tersebut menemukan terdapat hubungan yang signifikan antara predisposisi sosial ekonomi keluarga tersebut dengan perilaku memilih seseorang. Artinya, preferensi politik keluarga, terutama preferensi ayah atau ibu, berpengaruh pada preferensi politik anak dalam keluarga tersebut (Asrinaldi, 2012). Tidak hanya itu, dalam kasus perilaku memilih masyarakat kota Malang, preferensi dari suami juga sangat memengaruhi perilaku memilih

seseorang. Dari informan pendukung yang penulis wawancarai, sangat banyak pemilih (*voter*) yang memilih salah satu calon karena rekomendasi dari orang tua, suami atau istri maupun sanak saudara dari pemilih yang bersangkutan.

Kedekatan Dengan Masyarakat dan Pertukaran Kepercayaan Antara Calon dan Pemilih

Selain preferensi dari keluarga dan orang-orang terdekat, kedekatan calon dengan masyarakat sangat memengaruhi pilihan pemilih pada calon tersebut. Penulis mengkategorikan hal ini sebagai pertukaran kepercayaan antara calon dengan pemilih. Dalam kasus Abah Anton pada pemilih Walikota 2013 lalu, jauh sebelum mencalonkan diri sebagai Walikota, dia sudah terkenal di tengah masyarakat, sehingga saat mencalonkan diri mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat. Untuk kasus kemenangan Abah Anton, beliau memang sudah sangat terkenal dengan masyarakat jauh sejak sebelum mencalonkan diri sebagai calon Walikota. Jadi ketika turun ke lapangan, masyarakat seolah sedang dekat dengan pemimpinnya, meskipun Abah Anton dulu belum menjadi Walikota. Pada dasarnya mereka akan cenderung memilih dari yang mereka kenal dan punya *track record* yang baik.

Dari sini bisa terlihat bahwa masyarakat kota Malang tidak akan menerima begitu saja seorang calon yang datang pada

⁵ Beliau dipilih menjadi informan karena kapasitas beliau sebagai Praktisi politik. Beliau juga merupakan Sekretaris Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Cabang Kota Malang. Hal tersebut menjadi penting, karena partai Gerindra adalah Partai Pengusung Moh. Anton untuk maju dalam pemilihan kepala daerah Tahun 2013. Beliau juga adalah Mantan Legislatif Kota Malang Tahun 2004-2009 dari Partai Golongan Karya (Golkar), dan Calon Legislatif tahun 2014 dari partai Gerindra daerah pemilihan kecamatan Klojen, Kota Malang.

masyarakat hanya untuk kampanye. Jika hal itu dilakukan, kemungkinan besar akan mendapat penolakan dari masyarakat. Penolakan di sini bukan dalam arti tidak diterima oleh masyarakat, melainkan tidak akan dipilih ketika pemilihan sedang berlangsung. Menariknya, tidak semua calon yang dekat dengan masyarakat akan serta merta akan dipilih. Sebab, masyarakat hanya akan memilih calon yang memiliki *track record* yang baik. Karena pengaruh media, masyarakat cenderung menilai buruk proses kampanye politik, sebab media kerap menampilkan berita-berita buruk tentang politisi yang korup. Kondisi ini semakin diperparah dengan merebaknya wacana bahwa semua politisi sama saja, karena sama-sama mencari keuntungan untuk diri sendiri. Jika seorang calon memiliki *track record* yang baik, wacana yang disebarkan lewat media cenderung akan mental, dan masyarakat akan menerima dan tidak akan berpikiran negatif sekalipun calon tersebut sedang melakukan kampanye politik.

Menurut Achmad Fauzan, Abah Anton sebelum kampanye, beliau sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Ketika beliau turun ke masyarakat pada waktu kampanye, akhirnya banyak masyarakat yang tidak berfikiran negatif dengan Abah Anton. Mereka justru menyambut baik kedatangan beliau. Dalam kasus Abah Anton, *track record* yang baik itu dibangun oleh dua faktor utama: keamanan ekonomi dan rajin

bersedekah. Abah Anton dikenal sebagai seorang pengusaha sukses. Hal ini menjadikan masyarakat berpikir bahwa Abah Anton ketika terpilih nanti tidak akan memperkaya diri dengan korupsi, sebab pada dasarnya Abah Anton sudah memiliki keamanan ekonomi. Walau bagaimanapun juga, anggapan masyarakat pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak melakukan korupsi, karena jika korupsi, masyarakat sendiri yang dirugikan. Dari keamanan ekonomi ini, Abah Anton menjadi sering bersedekah. Salah satu cara bersedekah yang membuat Abah Anton sangat populer adalah ziarah ke *wali limo*.

Menurut Informan kunci yang bernama Andhi Mochsoni, Bukan rahasia lagi bahwa orang melihat Abah Anton karena kemampuan finansialnya. Logika orang awam, kalau sudah melihat calon pemimpinnya orang kaya, maka jelas mereka tidak akan korupsi ketika mereka menjadi Walikota. Selain itu, kedekatan Abah Anton dengan masyarakat juga dibangun lewat latar belakang Abah Anton yang beragam. Pertama, Abah Anton adalah seorang muslim yang terkenal rajin bersedekah dan selalu melaksanakan pengajian di dekat rumahnya. Hal ini membuatnya meraup dukungan dari kalangan masyarakat agamis. Kedua, Abah Anton memunyai latar belakang pebisnis, dan memiliki banyak relasi dengan kalangan pebisnis, sehingga kalangan yang bergerak disektor bisnis akan memberikan dukungannya pada Abah Anton. Terakhir,

Abah Anton memasukkan slogan “peduli wong cilik” pada media kampanye, sehingga orang-orang dari kalangan menengah bawah memberikan dukungan pada Abah Anton dengan harapan segala urusannya menjadi lebih lancar. Slogan “peduli wong cilik” juga semakin diperkuat dengan ziarah *wali limo* untuk masyarakat yang diberikan secara cuma-cuma oleh Abah Anton.

Dari sini bisa terlihat bahwa calon yang dekat dengan masyarakat, memiliki *track record* yang baik, serta memiliki latar belakang yang beragam, akan menjadikan calon tersebut memiliki jaringan sosial yang luas. Jaringan sosial ini dapat menggerakkan masyarakat untuk memilih calon yang bersangkutan, dan ini adalah cara yang jauh lebih efektif untuk memengaruhi perilaku memilih masyarakat ketimbang lewat media kampanye seperti baliho ataupun lewat media massa.

Lipset dan Rokkan (1967) menjelaskan ada dua model dalam penjelasan terkait dengan identifikasi kepartaian yang dikembangkan oleh pendekatan psikologis ini. Pertama, model kuat, yaitu keyakinan individu kepada suatu partai politik sebagai hasil identifikasi yang mendorongnya untuk memilih partai tersebut. Model ini juga menegaskan bahwa identifikasi kepartaian membangun dan menjaga konsistensi pendirian individu terhadap partai. Kedua, model lemah, yaitu keyakinan individu dalam mengidentifikasi dirinya terkait dengan kinerja partai masa lalu dan kebijakan partai masa

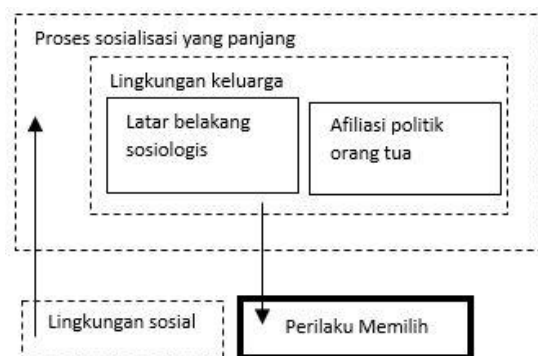
depan. Pembentukan keyakinan ini dipengaruhi oleh pengalaman individu dan pengaruh lingkungan masyarakat di sekitarnya. Jadi, berbeda dengan model kuat dimana individu mengidentifikasi dirinya tanpa keraguan terhadap kinerja partai dan cenderung dipengaruhi faktor internal yang kuat. Namun pada model lemah, identifikasi kepartaian tersebut sangat bergantung kepada faktor eksternal individu.

Kejadian yang dialami individu tersebut membentuk variabel penting lainnya yang menjadi perhatian pendekatan sosiologis ini, yaitu orientasi terhadap kandidat dan orientasi terhadap isu. Jadi, ketiga variabel ini saling memperkuat kecenderungan individu secara psikologis dalam menentukan pilihan akhirnya dalam bentuk dukungan kepada partai politik. Ini ditegaskan oleh Weisberg & Niemi, menurut mereka identifikasi kepartaian dapat dipengaruhi dan mempengaruhi kekuatan-kekuatan jangka pendek (*short term forces*) seperti adanya intervensi pemerintah atau partai politik melalui pembentukan orientasi isu jangka pendek (*short term issues*) dan orientasi kandidat (*short term candidate*) (Niemi et al., 2001).

Singkatnya, mashab sosiologis ini melihat pada proses sosialisasi politik yang diterima individu yang dimulai dari lingkungan keluarga hingga ke lingkungan sosial individu (Haliim, 2014). Proses sosialisasi tersebut ditandai dengan terbentuknya latar belakang sosiologis dan

karakteristik afiliasi politik orang tua. Gambar berikut dapat menjelaskan hubungan variabel dalam mashab sosiologis.

Gambar 1. Model Pendekatan Mashab Sosiologis. (Asrinaldi, 2012)



Pertukaran Ekonomi dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Politik Memilih

Kehadiran pendekatan ekonomi dalam menjelaskan perilaku memilih ini dapat menjadi alternatif untuk mengetahui seberapa jauh individu mampu bertindak rasional dalam pilihannya. Pendekatan ekonomi ini berangkat dari asumsi dasarnya bahwa individu cenderung bertindak rasional, yaitu memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dari tindakannya dan meminimalkan efek negatif dari tindakan yang dilakukan tersebut. Individu berusaha memanfaatkan potensi yang dimilikinya agar pilihan yang dibuat menghasilkan keuntungan kepada mereka.

Asumsi dasar dari pendekatan ini adalah bertolak dari pandangan ekonomi klasik bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional dan bertindak berdasarkan pada pertimbangan untung-rugi (ekonomi). Asumsi ini dikembangkan ke dalam dimensi politik, terutama dalam melihat perilaku memilih

individu dalam Pemilu. Menurut pendekatan ekonomi ini, tindakan individu memberikan suaranya dalam Pemilu tidak berhenti pada hari Pemilu saja, namun ia juga membawa konsekuensi yang panjang baik kepada diri individu hari itu (saat pemilihan dilakukan) dan juga pada masa depannya. Oleh karenanya, pilihan yang dibuat tersebut haruslah membawa keuntungan paling tidak bagi diri mereka sebagai pemilih. Artinya, individu sebagai pemilih berusaha membuat kalkulasi keuntungan secara ekonomis dan matematis dari tindakannya ketika memberikan suara dalam Pemilu.

Tindakan yang dianggap menguntungkan individu ini berdasarkan kepada kepentingan yang ingin diwujudkan. Misalnya, seorang pemilih dalam Pemilu bertindak rasional bagi dirinya, jika ia mendapatkan keuntungan yang maksimal dari pilihan yang dibuatnya; apakah itu dalam konteks keuntungan jangka pendek ataupun jangka panjang. Harus diakui, politik uang masih dilakukan oleh partai politik dan calon Walikota atau DPRD untuk meraih suara dari masyarakat ketika pemilu berlangsung (Buehler, 2014). Di Kota Malang, masyarakat yang cenderung materialistis dan mau dibeli suaranya adalah masyarakat dari kecamatan kedungkandang.

Menurut dari wawancara dengan Andhi Mochsoni⁶, Sampai sekarang *serangan fajar* masih punya pengaruh besar terhadap

⁶ Anggota Tim Sukses Pemenangan Pasangan Calon Mochammad Anton dan Sutiaji.

pola perilaku politik para pemilih. Nominalnya adalah berkisar 25 sampai dengan 300 ribu rupiah. Kecenderungan masyarakat untuk mau menerima uang juga bermacam-macam. Dari data yang didapatkan di lapangan, setidaknya ada empat alasan masyarakat mau menerima politik uang. Pertama, secara ekonomi belum mapan. Kedua, masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah juga demikian, cenderung mau menerima politik uang. Pendidikan rendah biasanya linier dengan kondisi ekonomi yang belum mapan, oleh karena itu mau menerima politik uang. Ketiga, memiliki asumsi bahwa semua politisi itu buruk. Ketimbang tidak mendapatkan apa-apa dari kinerja politisi tersebut, kecenderungan menerima uang dari politisi tersebut diambil. Keempat, untuk menghukum politisi nakal. Masyarakat yang memiliki alasan seperti ini sebenarnya sudah memiliki calon yang akan dipilih, jadi mengambil uang dari politisi nakal tapi tetap tidak memilih politisi nakal tersebut.

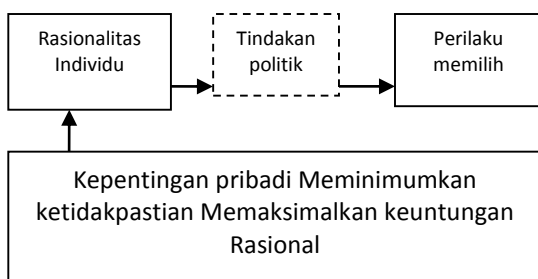
Kehadiran mashab ekonomi dalam menjelaskan perilaku memilih ini dapat menjadi alternatif untuk mengetahui seberapa jauh individu mampu bertindak rasional dalam pilihannya. Mashab ekonomi ini berangkat dari asumsi dasarnya bahwa individu cenderung bertindak rasional, yaitu memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dari tindakannya dan meminimalkan efek negatif dari tindakan yang dilakukan tersebut. Individu berusaha memanfaatkan potensi yang

dimilikinya agar pilihan yang dibuat menghasilkan keuntungan kepada mereka. Menurut penulis, Adanya kalkulasi keuntungan yang dipengaruhi ini sejalan dengan apa yang dijelaskan Downs (Gaffar, 1999) bahwa aktor rasional memiliki sifat (a) selalu membuat pilihan ketika mereka dihadapkan pada sejumlah pilihan yang menjadi alternatif; (b) menyusun alternatif pilihan yang mereka hadapi berdasarkan pemeringkatan, perbedaan, kelemahan sehingga dihasilkan suatu pilihan yang terbaik; (c) menentukan kecenderungan pilihan sesuai dengan pemeringkatan yang terbaik; dan (d) selalu membuat pilihan alternatif yang sama setiap saat, jika mereka dihadapkan pada keadaan yang sama. Namun, apa yang disampaikan Downs ini terlalu sederhana dan belum menjelaskan mengapa orang menjadi rasional dengan hanya membuat pemeringkatan alternatif dan memilih alternatif tersebut sebagai keputusannya. Padahal setiap pilihan yang dibuat tersebut memiliki tujuan yang harus direalisasikan oleh individu. Lalu, bagaimana menilai pilihan individu tersebut rasional?

Sehubungan dengan itu, Hastie & Dawes (dalam Lau & Redlawsk 2006) menjelaskan bahwa keputusan seseorang itu dapat dianggap rasional jika: (a) pilihan keputusan yang dibuat tersebut berdasarkan kepada keadaan *status quo* apa yang mereka miliki; dan walaupun harus kehilangan asset yang dimiliki, maka mereka akan mendapatkan ganti yang seimbang; (b) pilihan

keputusan tersebut yang dibuat tersebut memberi hasil yang nyata kepada pembuat keputusan; dan (c) keputusan yang dibuat itu tidak melanggar prinsip dasar yang menyebabkan peluang ketidakpastian dari keputusan tersebut menjadi besar atau mengancam apa yang ingin diperolehnya. Secara sederhana aspek rasionalitas dalam mashab ini dapat dijelaskan ke dalam gambar berikut.

Gambar 2. Model Pendekatan Mashab Ekonomi (Asrinaldi, 2012)



Penulis menegaskan rasionalitas pemilih tersebut tidak hanya dalam aspek pemenuhan kepentingan ekonomi individu saja, tapi harus membawa efek yang lebih besar misalnya ekonomi secara nasional. Artinya, pengaruh pilihan rasional individu ini juga membawa efek secara sistematis. Jadi tindakan rasional individu dalam memilih ini tidak hanya menyangkut diri individu tersebut, tapi juga akibat pada kerja sistem yang berlangsung seperti kinerja pemerintah, lingkungan sosio-ekonomi dan kebijakan publik.

Jadi, teori ekonomi yang bersandar pada pilihan rasional mensyaratkan adanya pemeringkatan pilihan untuk diputuskan oleh individu. Pemeringkatan pilihan tersebut

didasarkan pada pengetahuan individu untuk mengetahui untung-rugi dari pilihan yang dibuat (Sobari, 2017). Seorang pemilih yang rasional akan mengaitkan tindakan yang dilakukannya dengan kejadian masa lalu (retrospektif). Proses retrospektif ini membutuhkan informasi terkait dengan partai, kandidat dan kebijakan yang dievaluasi oleh individu.

Tukar-Menukar Harapan Perubahan Dari Calon Kepada Masyarakat

Dari semua informan, baik informan kunci maupun informan pendukung, berkeinginan agar kota Malang mengalami perubahan. Perubahan yang diinginkan pun beragam. Bagi masyarakat yang agamis menginginkan kota Malang semakin religius, bagi pebisnis menginginkan usaha-usaha mereka semakin lancar, dan bagi orang kecil menginginkan agar segala urusannya menjadi mudah termasuk urusan administrasi.

Dalam kasus pemilihan walikota 2013, mayoritas masyarakat kota Malang melihat sosok pembawa perubahan ada pada Abah Anton. Alasannya, Abah Anton memiliki beberapa latar belakang yang dapat dilihat masyarakat guna menjawab kebutuhan mereka. Pertama, Abah Anton terkenal dengan pengajian di dekat rumahnya yang dilaksanakan setiap malam jum'at. Selain itu, Abah Anton juga sangat terkenal dengan ziarah lima walinya, memberangkatkan masyarakat untuk ziarah ke makam lima wali secara gratis. Hal-hal tersebut meyakinkan

kelompok agamis. Kedua, Abah Anton memunyai latar belakang pebisnis, jadi bagi kalangan pebisnis Abah Anton dapat memperlancar bisnis mereka. Ketiga, Abah Anton memasukkan slogan “*peduli wong cilik*” pada media kampanyenya, jadi bisa meraih simpati kalangan menengah ke bawah.

Semua masyarakat kota Malang menginginkan perubahan, tentu saja perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan itu bisa terjadi jika kota Malang dipimpin oleh orang yang tepat. Pemimpin yang tepat adalah orang yang memiliki visi misi serta program kerja yang baik. Hanya dengan cara tersebut kota Malang dapat berubah ke arah yang lebih baik. Menariknya, meskipun masyarakat kota Malang menginginkan perubahan, namun visi misi serta program kerja sangat kurang untuk menjadi pertimbangan utama dalam memilih calon walikota.

Hal ini tentu saja kontradiktif, sebab visi misi serta program kerja sangat berpengaruh pada apa yang akan dilakukan seorang calon walikota ketika ia menjadi pemimpin kelak. Selain itu, masyarakat menginginkan perubahan tidak harus karena adanya masalah pada kebijakan pemerintahan yang sebelumnya, sebab pada masa pemerintah Peni Suparto (walikota Malang sebelum Abah Anton) kota Malang termasuk berprestasi, banyak mendapatkan penghargaan dan dibangunnya *fly over* yang penting bagi transportasi kota Malang.

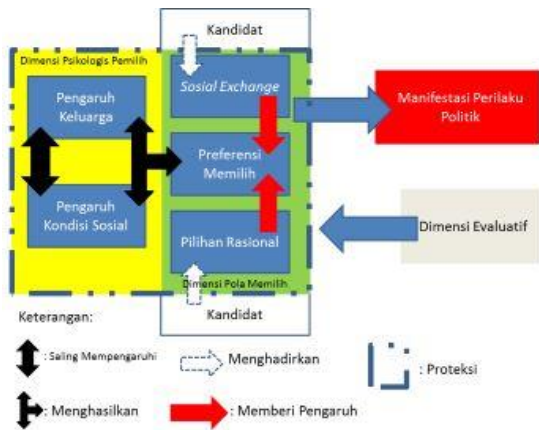
Menurut analisis penulis, Abah Anton dapat menjadi sosok pembawa perubahan,

walaupun masyarakat tidak tahu seperti apa visi misinya, sebab Abah Anton memiliki satu hal yang tidak dimiliki calon lain saat pemilihan walikota berlangsung: latar belakang yang beragam. Abah Anton adalah seorang peranakan Tionghoa-Jawa, Muslim, dan seorang pengusaha sukses. Jadi, secara latar belakang saja Abah Anton sebenarnya telah menjadi sosok pembawa perubahan dalam kancah politik di kota Malang yang selama ini lebih didominasi *Jowo Totok* (Jawa asli). Latar belakang yang beragam tersebut dijadikan modal untuk mendekati diri ke masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagai seorang muslim Abah Anton terkenal dengan pengajian di dekat rumahnya yang dilaksanakan setiap malam jum'at.

Hal tersebut meyakinkan kelompok agamis. Abah Anton memunyai latar belakang pebisnis, jadi bagi kalangan pebisnis, khususnya etnis Tionghoa, Abah Anton dapat memperlancar bisnis mereka. Lalu, Abah Anton memasukkan slogan “*peduli wong cilik*” pada media kampanyenya, dibuktikan dengan memberangkatkan masyarakat menengah bawah untuk ziarah ke makam lima wali secara gratis. Dari sini bisa terlihat bahwa Abah Anton menjadi sosok pembawa perubahan bagi masyarakat menengah bawah bukan dilihat dari visi misi serta program kerjanya, melainkan dari apa-apa yang telah dia lakukan bagi masyarakat menengah bawah tersebut. Jadi, sosok pembawa perubahan adalah seseorang yang telah melakukan

sesuatu yang berarti bagi masyarakat jauh sebelum dia terpilih sebagai seorang pemimpin.

Pola Perilaku Politik Masyarakat Kota Malang



Gambar 3. Pola Perilaku Politik Masyarakat Kota Malang.

Gambar pola perilaku politik Kota Malang diatas, adalah gambaran bagaimana perilaku politik masyarakat kota Malang dibentuk. Kiranya ada 4 elemen yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi terbentuknya pola perilaku politik sebuah masyarakat. Yang pertama adalah faktor lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga diyakini sebagai faktor pertama kali seseorang mendapatkan preferensi memilihnya. Kedua adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah lingkungan dimana setiap elemen individu bertemu dan melakukan interaksi sosial. Sehingga diyakini lingkungan sosial menjadi faktor berikutnya dari seseorang memperoleh preferensi memilih.

Preferensi memilih yang yang dihasilkan oleh dimensi-dimensi psikologis seperti itu tadi belum menjadikan acuan utama

bagi pemilih untuk menentukan pilihannya. Dalam dimensi pola memilih yang dibuat penulis, para pemilih masih bisa terpengaruh oleh dua faktor berikutnya. Yaitu faktor pertukaran sosial dan pilihan rasional. Dua faktor tersebut memang sengaja dihadirkan oleh satu aktor politik, yaitu kandidat. Faktor pertukaran sosial adalah faktor dimana para pemilih akan memilih para kandidat yang memang mereka kenali. Untuk pilihan rasional, para pemilih akan memilih salah seorang kandidat jika mereka ditawari iming-iming materi oleh para kandidat.

Menurut penulis, dua faktor inilah yang membuat preferensi para pemilih bisa berubah seketika. Karena dalam teori pertukaran sosial terjadi pertukaran yang saling menguntungkan antara kandidat dengan para pemilih. Pertukaran itu berdasarkan hal-hal yang materiel dan non-materiel. Dari segi materi, uang, *door price*, dll, adalah variabel yang dilakukan oleh kandidat untuk meraih preferensi dari para pemilih. Dari faktor non-materiel ada visi dan misi yang ditawarkan, hal tersebut memberikan harapan kepada masyarakat, ketika kandidat tersebut terpilih, maka beberapa urusan masyarakat akan bisa lebih terbantu. Dari tahap tersebutlah, orang akan menentukan manifestasikan perilaku politik dalam kegiatan pemilihan umum.

Para pemilih memiliki sifat selalu membuat pilihan ketika mereka dihadapkan pada sejumlah pilihan yang menjadi alternatif, menyusun alternatif pilihan yang mereka hadapi berdasarkan penerangan,

perbedaan, kelemahan sehingga dihasilkan suatu pilihan yang terbaik menentukan kecenderungan pilihan sesuai dengan pemeringkatan yang terbaik dan selalu membuat pilihan alternatif yang sama setiap saat, jika mereka dihadapkan pada keadaan yang sama.

Dalam pertukaran sosial yang memberi atau menukar objek-objek yang mengandung nilai antar-individu berdasarkan tatanan sosial tertentu. Adapun objek yang dipertukarkan itu bukanlah benda yang nyata, melainkan hal-hal yang tidak nyata. Ide tentang pertukaran itu juga yang menyangkut perasaan sakit, beban hidup, harapan, pencapaian sesuatu, dan pernyataan-pernyataan antar individu. Dengan demikian, ide tentang pertukaran itu sangat luas tetapi inklusif. Dengan demikian, ide tentang pertukaran itu sangat luas tetapi inklusif.

Dilihat dari motivasi yang melatar belakangi munculnya perilaku politik, maka Huntington dan Nelson, membagi perilaku politik dalam dua kategori (Sahid, 2011).

- a. Perilaku otonom, yaitu perilaku politik yang didorong oleh keinginan pelakunya sendiri untuk melakukan tindakan tersebut.
- b. Perilaku mobilisasi, yaitu perilaku politik yang digerakkan atau diinginkan oleh orang lain, bukan karena kesadaran atau keinginan pelakunya sendiri.

Sebagai suatu tindakan atau aktivitas, baik secara individual maupun kelompok, perilaku politik memiliki beberapa fungsi. Robert Lane dalam studinya tentang

keterlibatan politik, menemukan empat fungsi perilaku politik bagi individu-individu (Sastroatmodjo, 1995).

1. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis.
2. Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial.
3. Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus.
4. Sebagai sarana untuk memenuhi keutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu.

Dari sisi lain, Arbit Sanit (Rush & Althoff, 1971), memandang ada tiga fungsi perilaku politik. Pertama adalah memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik yang dibentuknya. Kedua, sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekeurangan pemerintah. Dan yang terakhir, sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkan sehingga kemudian diharapkan terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik, misalnya melalui pemogokan, huru-hara, dan kudeta.

Perilaku politik juga mempunyai fungsi bagi kepentingan pemerintah. Untuk kepentingan pemerintah, perilaku politik memiliki fungsi berikut, (1) Untuk mendorong program-program pemerintah. Hal ini berarti bahwa peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pemerintah. (2) Sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan masyarakat

untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan. (3) Sebagai sarana untuk memberikan masukan, saran dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan (Rushh & Althoff, 2005).

Perilaku politik sebagai suatu aktivitas, tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Banyak pendapat yang menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik; ada yang menyoroti faktor-faktor dari dalam diri seseorang, ada yang menyoroti faktor faktor-faktor dari luar dan ada yang menggabungkannya. Berbagai pendapat tersebut dapat dilihat dalam uraian berikut ini. Arnstein S.R melihat (Sahid, 2011), bahwa perilaku politik masyarakat didasarkan kepada faktor politik untuk menentukan suatu produk akhir. Lebih rinci, ia menjelaskan faktor politik tersebut meliputi komunikasi politik, kesadaran politik, pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan, dan kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik. Sedangkan menurut Frank Lindenfeld, faktor utama yang mendorong seseorang untuk berperilaku dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Dalam studinya, ia menemukan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik, dan orang yang bersangkutan akan menjadi apatis. Menurutnya, hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki kemampuan ekonomi.

Surbakti (1992) menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat perilaku politik seseorang. *Pertama*, aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga Negara, misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial dan kewajiban-kewajiban, seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya. *Kedua*, menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya.

Weimar menyebutkan, paling tidak ada lima faktor berikut yang mempengaruhi perilaku politik (Sastroatmodjo, 1995), yaitu modernisasi di segala bidang berimplikasi kepada komersialisasi pertanian, industrialisasi, meningkatnya arus urbanisasi, peningkatan tingkat pendidikan, meluasnya peran media massa, dan media komunikasi. Kemajuan itu berakibat pada meningkatnya perilaku warga negara, terutama di perkotaan, untuk turut serta dalam kekuasaan politik. Mereka ini, misalnya kaum buruh, para pedagang, dan para profesional.

Faktor berikutnya adalah adanya konflik di antara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang saling memperebutkan kekuasaan, sering kali untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan massa. Dalam konteks ini, sering

kali terjadi perilaku yang dimobilisasikan, dan yang terakhir adalah adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini sering kali merangsang tuntutan yang terorganisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan pemerintah dalam segala bidang kehidupan.

Milbrath memberikan empat alasan bervariasinya perilaku politik seseorang (Sahid, 2011). Alasan *pertama*, berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik. Meskipun demikian, dalam menanggapi perangsang-perangsang politik itu tentu dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, nilai-nilai, pengalaman, dan kepribadian yang dimiliki seseorang. Alasan *kedua*, berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang. Status sosial ekonomi, karakteristik suku, jenis kelamin, usia, keyakinan agama merupakan karakteristik sosial yang berpengaruh terhadap perilaku politik seseorang dalam politik.

Lebih lanjut alasan *ketiga*, menyangkut sifat dan sistem politik dan partai tempat seseorang itu berada. Seseorang yang hidup dalam negara-negara demokratis, partai-partai politik cenderung mencari

dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa. Karena itu, massa cenderung berperilaku dalam politik. Alasan *keempat*, perbedaan keadaan geografis dan lingkungan. Keadaan geografis dan lingkungan berpengaruh terhadap pembentukan watak dan tingkah laku individu. Perbedaan-perbedaan keadaan geografis dan lingkungan akan menyebabkan perbedaan-perbedaan perilaku politik dan perilaku politik seseorang.

Dalam konteks Indonesia, Arbi Sanit menyebutkan lima faktor yang mendorong perilaku politik masyarakat Indonesia (Sahid, 2011). *Pertama*, adanya kebebasan berkompetisi di segala bidang, termasuk di bidang politik. *Kedua*, adanya kenyataan berpolitik secara luas dan terbuka. *Ketiga*, adanya penyebaran sumber daya politik dalam masyarakat yang berupaya kekayaan dalam masyarakat. *Kelima*, adanya distribusi kekuasaan di kalangan masyarakat sehingga tercipta suatu peimbangan kekuatan.

Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba, faktor lain yang juga sangat mempengaruhi tingkat perilaku masyarakat adalah budaya kewargaan (*civic culture*) (Almond et.al., 1990). Bahkan, faktor ini merupakan sesuatu yang menjadi titik inti tumbuhnya perilaku politik warga. Budaya kewargaan (*civic culture*) pada hakikatnya merupakan cermin dari tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokratis dalam masyarakat yang baik (*good citizen*). Menurut Sahid (2011), warga Negara yang baik pada

dasarnya tercermin dalam manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia pembangunan yang ber-Pancasila yang berkarakteristik sebagai berikut: (1) memiliki kesadaran sebagai warga Negara, (2) memiliki rasa tanggungjawab terhadap masyarakat, dan (3) perilaku terhadap pembangunan. Oleh karena itu, indikator warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara meliputi kemampuan: (1) ikut serta atau berperilaku dalam mewujudkan negara yang demokratis (demokrasi politik), (2) berperilaku dalam mewujudkan kemanusiaan (demokrasi sosial), dan (3) berperilaku dalam mewujudkan keadilan sosial (demokrasi ekonomi).

Menurut Cogan dan Derricott, terdapat delapan karakteristik warga negara yang baik sebagai cerminan dari budaya kewargaan kontemporer (*civic culture contemporary*) (Cogan dan Dericott, 2014), yaitu: (1) kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global, (2) kemampuan bekerja sama dan bertanggung jawab, (3) memahami, menerima, dan menghormati perbedaan budaya, (4) berpikir kritis dan sistematis, (5) menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan, (6) mengubah gaya hidup guna melindungi lingkungan, (7) memiliki kepekaan dan mempertahankan hak asasi manusia, dan (8) berperilaku dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional dan internasional.

Perilaku politik dinilai secara berbeda-beda di dalam masyarakat yang

berbeda, di mana hal itu dianggap sebagai tujuan yang perlu dicapai. Perluasan perilaku politik melibatkan biaya dan konsepsi ditinjau dari segi tujuan-tujuan lain, serta biaya-biaya dan konsepsi itu berada di antara masyarakat-masyarakat yang berlainan pada tingkat yang berlainan dari modernisasi atau pembangunan secara keseluruhan (Hadiz, 2010). Pokok persoalan yang penting adalah bahwa peranan perilaku politik di dalam masyarakat merupakan satu fungsi dari prioritas-prioritas yang diberikan kepada *variable* dan tujuan-tujuan lain dari strategi pembangunan secara keseluruhan.

Pembangunan yang dimaksud di sini adalah sebagai proses modernisasi atau proses pembangunan bangsa (*nation building*) di segala bidang, baik ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, maupun mental. Dalam hal ini, terkandung satu pengertian bahwa pemberian prioritas pertama kepada pembanguna ekonomi, seperti pada masa orde baru hanyalah merupakan suatu strategi menuju ke arah itu. Sukses dalam pembangunan ekonomi diharapkan akan melimpah ke bidang-bidang lain sehingga merangsang mereka untuk berkembang pula.

Di dalam proses pembangunan secara keseluruhan, perluasan perilaku politik dapat dipahami sebagai berikut: (a) sebagaisuatu tujuan utama kaum elite politik, kekuatan-kekuatan sosial, dan perorangan-perorangan yang terlibat di dalam proses itu; (b) sebagai sarana kaum elite, kelompok-kelompok, perorangan-perorangan utnukmencapai

tujuan-tujuan lain yang mereka nilai tinggi; atau (c) sebagai hasil sampingan atau konsekuensi tercapainya tujuan-tujuan lain, baik oleh masyarakat secara keseluruhan, oleh kaum elite, kelompok-kelompok, dan perorangan-perorangan di dalam masyarakat (Sahid, 2011).

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, perluasan perilaku politik jarang merupakan satu tujuan utama bagi kaum elite politik di dalam masyarakat yang sedang berkembang. Kalaupun perilaku politik memang bertambah, maka tingkat perluasan itu sebagian besar mencerminkan sejauh mana perilaku itu merupakan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan lain atau merupakan hasil sampingan sebagai akibat tercapainya tujuan-tujuan lain itu. Pemimpin-pemimpin politik akan berusaha untuk memperluas perilaku politik apabila mereka menganggap perluasan itu sebagai cara untuk memperkuat atau mempertahankan kekuasaan mereka dan untuk membina usaha-usaha mencapai tujuan-tujuan lain yang mereka anggap perlu dicapai, seperti kemerdekaan nasional atau pemerataan sosio-ekonomi. Akan tetapi, bagi mereka yang memiliki kekuasaan politik akan lebih cenderung untuk memperkuat kekuasaan mereka sendiri dan memajukan kestabilan politik dengan jalan membatasi perilaku politik daripada memperluasnya (Haliim, 2017). Sebaliknya, usaha mengejar tujuan-tujuan seperti pembangunan ekonomi, pemerataan sosio-ekonomi, dan malahan kestabilan politik dapat menimbulkan kondisi-

kondisi yang memudahkan perluasan perilaku politik. Demikian pula, cara-cara yang dipilih oleh kaum elite politik dan pemerintahan untuk melaksanakan program-program pemerintah mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi tingkat dan sifat perilaku politik.

Pembangunan mampu memberikan dorongan terhadap peningkatan perilaku politik. Pada tingkat yang lebih luas, memang melihat adanya korelasi antarkedua faktor dimaksud. Huntington dan Nelson menguraikan secara singkat bagaimana hubungan itu terjadi (Sahid, 2011). *Pertama*, di dalam suatu masyarakat, tingkat perilaku politik cenderung bervariasi dengan status sosio-ekonomi. Mereka yang berpendidikan lebih tinggi, berpenghasilan lebih besar dan mempunyai status pekerjaan yang lebih tinggi biasanya lebih partisipatif daripada mereka yang miskin, tak berpendidikan dan memiliki pekerjaan berstatus rendah. Pembangunan ekonomi memperluas proporsi peranan berstatus lebih tinggi di dalam masyarakat, meningkatnya kadar melek huruf, berpendidikan, makmur, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kelas menengah. Oleh sebab itu, bagian masyarakat yang berpartisipasi di bidang politik menjadi lebih banyak.

Kedua, pembangunan ekonomi dan sosial melibatkan ketegangan dan tekanan antarkelompok sosial. Kelompok-kelompok yang baru bermunculan, kelompok-kelompok yang sudah mapan mulai terancam, dan

kelompok-kelompok yang lebih rendah menggunakan kesempatan untuk memperbaiki nasib mereka. Sebagai akibatnya, meningkatlah konflik antarkelas sosial, daerah, sedang kelompok-kelompok komunal dan konflik menciptakan kesadaran kelompok, yang belakangan melahirkan tindakan kolektif oleh satu kelompok untuk mengembangkan dan melindungi tuntutan-tuntutannya terhadap berbagi kelompok lain. Singkatnya, kelompok itu harus memasuki politik.

Ketiga, perekonomian yang semakin kompleks menyebabkan bertambah banyaknya organisasi dan perkumpulan dan meningkatnya jumlah orang yang terlibat dalam kelompok-kelompok itu. Organisasi-organisasi perusahaan, perkumpulan-perkumpulan petani, serikat buruh, organisasi komunitas, demikian pula organisasi-organisasi kebudayaan, rekreasi, dan malahan keagamaan, merupakan ciri-ciri yang lebih menonjol bagi masyarakat-masyarakat yang lebih maju. Di Indonesia, misalnya pembangunan ekonomi telah diikuti oleh peningkatan jumlah perkumpulan-perkumpulan, sedang rasio penduduk jauh lebih tinggi di propinsi-propinsi yang lebih berkembang. Kedua kesimpulan itu memberikan petunjuk tentang adanya suatu korelasi positif antara pembangunan sosio-ekonomi dan intensitas di bidang perkumpulan. Keterlibatan dalam organisasi pada umumnya juga dihubungkan dengan perilaku politik.

Keempat, pembangunan ekonomi, untuk sebagian, memerlukan dan untuk sebagian lagi, menghasilkan perluasan penting dari fungsi-fungsi pemerintah. Sementara lingkup kegiatan pemerintah dengan jelas dipengaruhi oleh nilai-nilai dan ideology politik yang dominan dalam masyarakat, ia semakin dipengaruhi lagi oleh tingkat pembangunan ekonomi di dalam masyarakat itu. Masyarakat-masyarakat industri maju dan yang mempunyai pemerintahan yang menganut paham ekonomi liberal sering kali mempunyai perekonomian yang lebih tingkat sosialisasinya dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat agraris yang diperintah orang-orang sosialis yang sudah mapan. Yang disebut pertama hanya memerlukan lebih banyak promosi, pengaturan dan retribusi oleh pemerintah. Akan tetapi, semakin tindakan-tindakan pemerintah mempengaruhi kelompok-kelompok akan melihat relevansi pemerintah bagi tujuan-tujuan mereka sendiri, dan semakin giatlah mereka mempengaruhi pengambil keputusan pemerintah (Dewi & Aziz, 2016).

Kelima, modernisasi sosio-ekonomi biasanya berlangsung dalam bentuk pembangunan nasional. Negara merupakan wahana bagi modernisasi sosio-ekonomi. Oleh sebab itu, maka bagi perorangan, hubungannya dengan negara menjadi sangat penting, dan identitasnya sebagai bagian dari negara cenderung mengabaikan loyalitas lainnya. Secara teoritis, loyalitas itu

dinyatakan dalam konsep kewarganegaraan, yang mengabaikan perbedaan kelas sosial dan kelompok komunal, dan memberikan landasan bagi perilaku politik secara missal (Chaliq, 2011). Semua warga negara berkedudukan sama di hadapan negara, semuanya mempunyai tanggung jawab yang sama pada tingkat minimal tertentu sebagai para pelaku dalam negara. Dengan demikian, maka modernisasi sosio-ekonomi mengandung arti adanya suatu kebudayaan dan pandangan politik yang cukup mengesankan, dan oleh sebab itu memudahkan perilaku politik.

Kelompok-kelompok dan perorangan-perorangan di dalam satu masyarakat yang sedang berkembang juga tidak mungkin menilai perilaku politik sebagai tujuan pada dirinya sendiri, dan akan lebih cenderung untuk lebih dulu menggunakan cara-cara lain yang mungkin untuk memperbaiki status sosial dan kesejahteraan materi mereka. Akan tetapi, tercapainya tujuan-tujuan lain itu mungkin sekali mengakibatkan meningkatnya perilaku politik. Dengan demikian, maka pada umumnya perilaku politik tidak akan dikejar atas landasan instrumental, sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain, dan besar sekali kemungkinannya ia akan muncul sebagai hasil sampingan sebagai akibat tercapainya sesuatu tujuan lain.

Kesimpulan

Masyarakat memerlukan pengetahuan politik yang cukup untuk bisa menentukan

sikap politiknya dengan arif bijaksana. Yang dimaksud sikap arif bijaksana adalah ketika individu mempunyai keputusan yang rasional ketika ingin menentukan pilihan, meskipun ada pengaruh yang berasal dari keluarga, lingkungan sosial maupun tawaran materi dari para kandidat.

Disinilah peran pemerintah untuk membantu para pemilih untuk memiliki pengetahuan politik yang cukup. Dengan pengetahuan politik yang baik, masyarakat akan memiliki kesadaran politik yang baik pula. Kesadaran dan pengetahuan yang baik tentang politik, pemetintah bisa melakukan sosialisasi melalui media massa secara terus menerus, contohnya melalui media elektronik. Tujuannya adalah pengetahuan politik ini bisa ditransfer dengan baik dengan dimulai dari keluarga. Karena, Dari keluargalah preferensi individu pertama kali terbentuk. Baik atau buruknya preferensi individu juga bisa dilihat dari bagaimana pengetahuan atau kesadaran politik yang dimiliki keluarga. Jika individu tersebut memiliki pengetahuan yang baik terkait politik, niscaya individu akan mempunyai sedikit-banyak pengaruh yang baik terkait politik kepada lingkungan sosialnya.

Tantangan barikutnya ada didalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat Kota Malang harus bisa mempertahankan kondisi yang kondusif bagi para individu dan keluarga dengan pengetahuan politik yang cukup. Karena dari hal-hal tersebutlah kita bisa mengharapkan masyarakat yang memiliki

perilaku dan budaya politik baik. Namun, pertukaran sosial akan selalu didasarkan pada ide, bahwa orang memandang hubungan mereka dalam konteks sosial. Mereka akan cenderung menghitung pengorbanan dan membandingkannya dengan penghargaan yang didapatkan dengan meneruskan hubungan itu. Pengorbanan (*cost*) dan penghargaan (*rewards*) merupakan elemen-elemen dalam dimensi pertukaran sosial. Politik uang lahir dari pendekatan ini.

Namun yang harus kita pahami bersama, bahwa kecenderungan masyarakat untuk mau menerima uang juga bermacam-macam. Dari data yang didapatkan di lapangan, ada beberapa alasan masyarakat mau menerima politik uang. Pertama, secara ekonomi belum mapan. Kedua, masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah juga demikian, cenderung mau menerima politik uang. Pendidikan rendah biasanya linier dengan kondisi ekonomi yang belum mapan, oleh karena itu mereka mau menerima uang sebagai pertukaran politik. Dan dampak dari politik uang adalah masyarakat dalam posisi tawar yang rendah dalam setiap pembuatan kebijakan. Karena suara mereka tidak lagi diwakilkan, namun di '*beli*' oleh politisi. Maka dari itu, politik uang justru menghasilkan dampak buruk kepada masyarakat.

Jadi, ketika politik uang dinilai menjadi sebuah perilaku dan budaya politik yang buruk, maka pemerintah atau negara wajib menyelesaikan masalah-masalah sosial

penyebab politik uang terjadi, bukan membuat aturan yang menuntut masyarakat untuk berubah. Dimana ada beberapa sektor yang wajib untuk pemerintah rubah, yaitu memperbanyak lapangan kerja, agar kondisi ekonomi masyarakat membaik. Kedua adalah menyediakan pendidikan yang merata, khususnya pendidikan politik. Ketika kedua hal tersebut bisa dipenuhi oleh pemerintah, maka niscaya masyarakat tidak hanya paham terkait problematika dunia politik, namun *self defence mechanism* masyarakat terhadap politik uang juga akan meningkat.

Daftar Pustaka

- Almond, G. A., Verba, S., & Simamora, S. (1990). *Budaya politik: tingkah laku politik dan demokrasi di lima negara*. Bumi Aksara.
- Asrinaldi. (2012). *Politik Masyarakat Perkotaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Buehler, M. (2014). *Elite Competition and Changing State-Society Relations: Shari'a Policymaking in Indonesia. Beyond oligarchy: Wealth, power, and contemporary Indonesian politics*, 157-75.
- Chalik, A. (2014). *Islam Mataraman dan Orientasi Politiknya dalam Sejarah Pemilu di Indonesia*. ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, 5 (2), 269-277.
- Cogan, J., & Derricott, R. (2014). *Citizenship for the 21st century: An international perspective on education*. Routledge.

- Creswell, J. W. (2012). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Dewi, KH, & Aziz, N. L. L. (2016) *Gagasan pemilihan umum kepala daerah asimetris: menuju tata kelola pemerintahan daerah demokratis, akuntabel dan berkelanjutan*. Yogyakarta: Calpulis.
- Domikus, Y. (1999). *Perilaku Sosioemosional dalam Perkawinan Aplikasi Teori Pertukaran Sosial dalam Mewujudkan Perkawinan yang Stabil dan Memuaskan*. *Jurnal Psikologi Sosial*: No. V. Jakarta: Fakultas Psikologi UI.
- Gaffar, A. (1999). *Politik Indonesia: transisi menuju demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- Flanagan, W. G. (2010). *Urban sociology: images and structure*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective*. Stanford: Stanford University Press.
- Haliim, W. (2014). *Bangkitlah Pancasila!!: Sebuah Gagasan Berbangsa dan Bernegara*. Malang: UB Press.
- Haliim, W. (2017). *Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif*. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 42 (1), 19-30.
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik praktis riset komunikasi: Disertai contoh praktis riset media, public relations, advertising, komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Lau, R. R., & Redlawsk, D. P. (2006). *How voters decide: Information processing in election campaigns*. Cambridge University Press.
- Lipset, S. M., & Rokkan, S. (Eds.). (1967). *Party systems and voter alignments: Cross-national perspectives (Vol. 7)*. Free press.
- Mulyadi, M. (2011). *Penelitian kuantitatif dan kualitatif serta pemikiran dasar menggabungkannya*. *Jurnal studi komunikasi dan media*, 15 (1), 127-138.
- Mustafa, H. (2011). *Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial*. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 7(2).
- Mosca, G. (1939). 3. *On the Ruling Class*.
- Niemi, R. G., Weisberg, H. F., & Kimball, D. C. (Eds.). (2001). *Controversies in voting behavior (p. 1)*. Washington, DC: CQ Press.
- Rush, M., Althoff, P., & Kartono, K. (1971). *Pengantar sosiologi politik*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sahid, K. (2011). *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sastroatmodjo. (1995). *Profil Budaya Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Sobari, Wawan. (2017). *Patronage Driven Democracy: Emerging Local Politics*

- in the Post-Soeharto Indonesia.
Surabaya: Airlangga University Press.
- Sugiyono, P. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, R. (1992). Memahami ilmu politik. Grasindo.
- Warsono, Nono. (2010). Teori Pilihan Rasional. Cirebon: IAIN Syaikh Nurjati.
- Wirawan, I. B. (2012). Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Prilaku Sosial) Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Yin, R. K. (2013). Case study research: Design and methods. Sage publications.